

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kabupaten Kepulauan Mentawai

2014



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

**INDIKATOR KESEJAHTERAAN
RAKYAT
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
2014**

<https://mentawai.kab.go.id>

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI 2014

ISBN: 978-602-355-019-7

No. Publikasi: 13012.1501

Katalog BPS: 4102004.1301

Ukuran Buku: 14,8 cm x 21 cm

Jumlah Halaman: v + 74 halaman

Naskah:

BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai

Gambar Kulit:

BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai

Diterbitkan oleh:

© BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai

Dicetak Oleh:

CV. Graphic Dwipa (Cetakan I: Desember 2015)

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

Publikasi “Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kepulauan Mentawai 2014” merupakan publikasi tahunan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Dalam publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kepulauan Mentawai 2014 ini disajikan informasi tentang beberapa bidang diantaranya yaitu: Kependudukan, Keluarga Berencana, Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga serta Perumahan. Data dalam publikasi ini merupakan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) serta Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2013.

Untuk bahan evaluasi kebijakan program pembangunan yang telah dijalankan serta merencanakan kebijakan di masa mendatang, perlu dipantau situasi dan kondisi serta tingkat perkembangan sosial masyarakat. Sehubungan dengan hal itu, dalam pendayagunaan data statistik yang tersedia, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Mentawai menghimpun data dalam tabel-tabel dan grafik yang dilengkapi analisa deskriptif sehingga terwujud dalam bentuk Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kepulauan Mentawai 2014.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyajian publikasi ini, disampaikan ucapan terima kasih. Untuk peningkatan dan penyempurnaan publikasi berikutnya, kami mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak.

Tuapeijat, Oktober 2015

BADAN PUSAT STATISTIK
KAB. KEPULAUAN MENTAWAI
KEPALA,

EVI JUNAIDI, S.ST., M. Si

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	lii
Daftar Isi	lv
Bab. I Pendahuluan	1
Bab. II Kependudukan dan KB	5
Bab. III Kesehatan dan Gizi	19
Bab. IV Pendidikan	33
Bab. V Ketenagakerjaan	41
Bab. VI Pengeluaran dan Kemiskinan	51
Bab. VII Perumahan dan Lingkungan	59
Bab. VIII Keterbandingan Kabupaten dan Kota	67

1

Pendahuluan

<https://mentawakab.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

Peningkatan derajat kesejahteraan rakyat merupakan salah satu tujuan utama dari suatu program perekonomian suatu daerah. Dalam kaitan tersebut akan diperlukan suatu perencanaan program yang matang dan dapat mengakomodasikan tingkat kesejahteraan bagaimana yang seharusnya dicapai, apa yang perlu diperhatikan terlebih dahulu, bagaimana prosedur pelaksanaannya dan bagaimana memantau hasil yang telah dicapai untuk mengetahui apakah sesuai dengan sasaran (target) yang diinginkan atau tidak.

Untuk hal itulah, peran data dan statistik semakin dirasakan penting pada akhir-akhir ini, terutama yang secara spesifik berkaitan erat dengan permasalahan kesejahteraan rakyat. Hal ini dikaitkan adanya kebutuhan untuk perencanaan suatu program pembangunan yang rasional dan sistematis.

Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2014 merupakan salah satu wahana yang dapat membantu memberikan berbagai data output dan input kesejahteraan rakyat yang ada di masyarakat sebagai hasil dari berbagai proses pembangunan. Data yang disajikan merupakan hasil dari suatu proses pengukuran berbagai fenomena/kejadian yang terjadi dari berbagai hasil proses program pembangunan. Sehingga dengan mengamati berbagai data yang disajikan tersebut, dapat diantisipasi lebih dini mana yang harus diprioritaskan dan mana yang harus diperbaiki programnya.

1.1 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penulisan Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2014 ini adalah untuk mengukur indikator-

indikator kesejahteraan yang terjadi dalam masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Secara khusus penulisan Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2014, bertujuan antara lain:

- a. Menggambarkan perkembangan kependudukan dan efektifitas program untuk menekan pertumbuhan penduduk dengan keluarga berencana.
- b. Mengukur tingkat kesehatan dan gizi masyarakat antara lain tingkat kesakitan (morbiditas), pemanfaatan fasilitas kesehatan, kesehatan balita dan sebagainya.
- c. Menggambarkan keadaan pendidikan dengan persentase angka melek huruf, angka partisipasi sekolah, rata-rata lama sekolah dan angka putus sekolah serta indikator lainnya.
- d. Melihat perkembangan ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- e. Menggambarkan kondisi kemiskinan dan pola konsumsi penduduk.
- f. Mengukur indikator-indikator sosial dan kesejahteraan rakyat lainnya seperti perumahan dan lingkungan, akses terhadap teknologi informasi.
- g. Menggambarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan metode yang telah diperbaharui dan keterbandingannya dengan Kab/Kota lain di Sumatera Barat.

1.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan Inkesra Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2014 ini adalah hasil olahan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2013-2014. Selain itu, untuk ketenagakerjaan data yang digunakan adalah dari hasil olahan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2013-2014. Sebagai pelengkap beberapa data juga diambil dari hasil kompilasi Kepulauan Mentawai

Dalam	Angka	2013-2014.
-------	-------	------------

2

*Kependudukan
dan KB*

<https://mentawai.kab.bps.go.id>

BAB II

KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

Penduduk merupakan modal dasar dan faktor dominan bagi pembangunan. Dalam pembangunan, penduduk merupakan subjek sekaligus objek sehingga kualitas dan produktivitasnya perlu diperhatikan. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi tetapi dapat pula menjadi beban dalam pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dengan kualitas yang rendah dan pertumbuhan yang cepat akan menjadi beban dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, dalam menangani masalah kependudukan untuk menunjang keberhasilan pembangunan perlu dititikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusianya, bukan hanya dalam upaya pengendalian penduduk dan penyebarannya saja.

2.1 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk di Kabupaten Kepulauan Mentawai dari tahun ke tahun semakin meningkat. Jumlah penduduk tahun 2013 tercatat sebanyak 81.840 jiwa, terdiri dari 42.503 jiwa laki-laki dan 39.337 jiwa perempuan. Pada tahun 2014 jumlah penduduk di Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami pertumbuhan sebesar 2,13 persen dibanding tahun 2013, yaitu tercatat sebanyak 83.603 jiwa, terdiri dari 43.392 jiwa laki-laki dan 40.211 jiwa perempuan.

Tabel 2.1
Jumlah dan laju Pertumbuhan Penduduk, 2013-2014

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)			Laju Pertumbuhan per Tahun (persen)
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2013	42.503	39.337	81.840	
				2,13 (2013-2014)
2014	43.392	40.211	83.603	

Sumber: SP2010, Proyeksi Penduduk

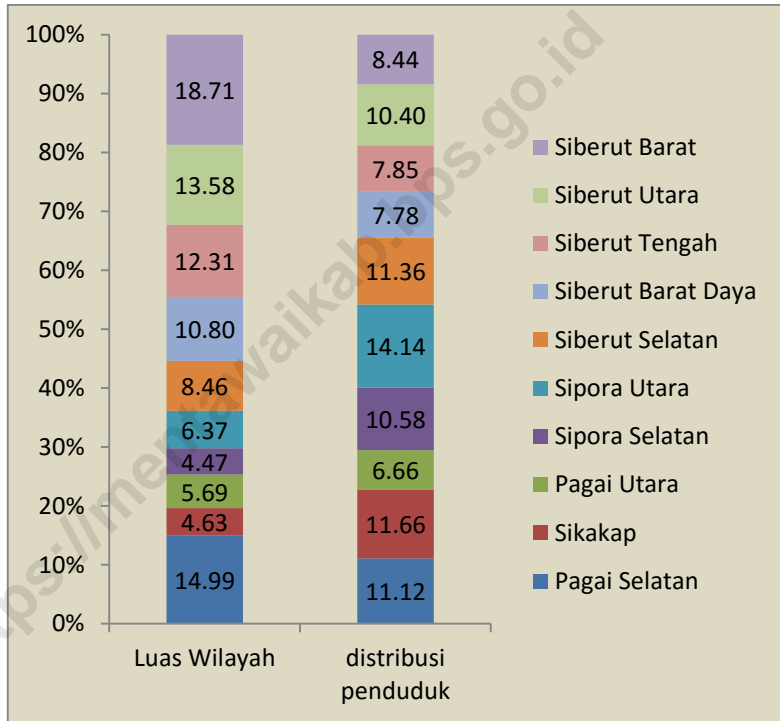
Pertambahan penduduk dari tahun ke tahun harus dapat dikendalikan dan diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan melalui program pembangunan yang berkesinambungan, sehingga persentase penduduk yang sejahtera semakin meningkat atau setidaknya tidak mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini perlu mendapat perhatian dalam rangka pengendaliannya ke depan dan harus disertai dengan penambahan fasilitas umum (sekolah, fasilitas kesehatan, dan lain-lain) serta pemenuhan kebutuhan bahan pangan.

2.2 Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Kabupaten Kepulauan Mentawai mempunyai 10 (sepuluh) kecamatan. Kecamatan Siberut Barat merupakan kecamatan dengan luas wilayah terbesar yaitu 18,71 persen dari wilayah kabupaten. Dengan wilayah terluas, penduduk Siberut Barat memiliki persentase distribusi penduduk sebesar 8,44 persen pada tahun 2014. Penduduk terbanyak ada di Kecamatan Sipora Utara yang merupakan ibukota kabupaten yaitu dengan persentase distribusi sebesar 14,14 persen pada tahun 2014. Hal ini menjelaskan bahwa persentase jumlah penduduk belum

sebanding dengan luas wilayahnya. Kecamatan dengan luas wilayah terbesar belum tentu memiliki penduduk terbesar dan sebaliknya.

Gambar 2.1
Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai
(persen), 2014



Sumber: Proyeksi Penduduk

Kecamatan dengan persentase wilayah lebih tinggi daripada persentase penduduknya terdapat di Kecamatan Siberut Barat, Siberut Utara, Siberut Tengah, Siberut Barat Daya dan Pagai Selatan. Sebaliknya, kecamatan yang persentase penduduknya lebih besar daripada persentase wilayah terjadi di Kecamatan Siberut Selatan, Sipora Utara, Sipora Selatan, Pagai Utara dan Sikakap.

Sementara itu, kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi tercatat di Kecamatan Sikakap, disusul Kecamatan Sipora Selatan dan Kecamatan Sipora Utara. Sedangkan kecamatan dengan kepadatan terendah adalah Kecamatan Siberut Barat. Secara umum kepadatan penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai masih tergolong rendah yaitu sebesar 13,61 pada tahun 2014. Hal ini berarti secara rata-rata di Kabupaten Kepulauan Mentawai terdapat sekitar 13-14 penduduk setiap 1 km². Konsentrasi penduduk dengan kepadatan tinggi di Kecamatan Sikakap, Sipora Selatan dan Sipora Utara menunjukkan adanya daya tarik dari ketiga kecamatan tersebut, baik dari potensi alam, maupun kemajuan daerahnya.

Tabel 2.2
Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan, 2013-2014

Kecamatan	Persentase Distribusi Penduduk (persen)		Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)	
	2013	2014	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pagai Selatan	11,13	11,12	10,11	10,32
Sikakap	11,66	11,66	34,28	35,02
Pagai Utara	6,66	6,66	15,94	16,29
Sipora Selatan	10,57	10,58	32,23	32,95
Sipora Utara	14,15	14,14	30,23	30,85
Siberut Selatan	11,36	11,36	18,29	18,68
Siberut Barat Daya	7,78	7,78	9,81	10,02
Siberut Tengah	7,85	7,85	8,68	8,87
Siberut Utara	10,39	10,40	10,42	10,65
Siberut Barat	8,45	8,44	6,14	6,27
KABUPATEN	100	100	13,3	13,91

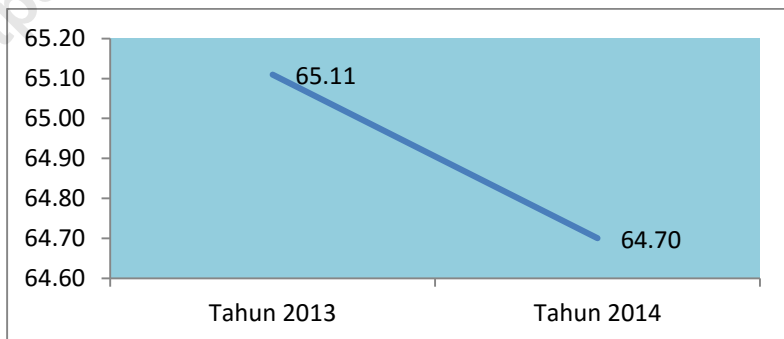
Sumber: Proyeksi Penduduk

Dilihat dari distribusi penduduk dan kepadatannya, terlihat bahwa persebaran penduduk di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih belum merata. Untuk itu perlu diperhatikan kecamatan dengan kepadatan rendah untuk dilakukan peningkatan pembangunan fasilitas-fasilitas dan infrastruktur yang mendukung daya tarik penduduk untuk bermukim di kecamatan tersebut.

2.3 Rasio Ketergantungan

Salah satu keuntungan dari pembangunan di bidang kependudukan adalah menurunnya Rasio Ketergantungan. Rasio Ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk usia 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Semakin kecil Rasio Ketergantungan berarti semakin rendahnya proporsi penduduk usia tidak produktif. Dengan demikian, beban tanggungan penduduk usia produktif menjadi semakin ringan sehingga diharapkan penduduk usia produktif lebih mampu untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Gambar 2.2
Perkembangan Rasio Ketergantungan (persen), 2013– 2014



Sumber: Proyeksi Penduduk

Pada kurun waktu 2013-2014 tercatat terjadi penurunan angka beban ketergantungan dari 65,11 persen pada tahun 2013 menjadi 64,70 persen pada tahun 2014. Penurunan angka Rasio Ketergantungan tersebut sangat baik jika diimbangi oleh pembangunan dibidang ekonomi dengan penyediaan lapangan pekerjaan sehingga penduduk usia produktif benar-benar produktif secara ekonomi.

Tabel 2.3
Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Rasio Ketergantungan
(persen), 2013-2014

Tahun	Umur (tahun)			Rasio Ketergantungan
	0-14	15-64	65+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2013	37,12	60,56	2,31	65,11
2014	36,94	60,72	2,34	64,70

Sumber: Proyeksi Penduduk

Dari komposisi penduduk usia produktif dan penduduk usia tidak produktif, terlihat bahwa proporsi penduduk usia 0-14 tahun semakin menurun dan penduduk usia produktif (15-64 tahun) semakin meningkat. Peningkatan proporsi usia produktif harus menjadikan kerja ekstra bagi pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka yang ada pada usia produktif tersebut. Dengan demikian peningkatan penduduk usia produktif akan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi kabupaten.

2.4 Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu variabel antara yang berpengaruh terhadap fertilitas. Fertilitas berpengaruh terhadap angka kelahiran dan akhirnya berpengaruh pada laju pertumbuhan penduduk.

2.4.1 Status Perkawinan

Berdasarkan status perkawinannya komposisi penduduk 10 tahun ke atas tercatat seperti dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.4
Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Status Perkawinan
(persen), 2014

Tahun	Status Perkawinan				Jumlah
	Belum kawin	Kawin	Cerai hidup	Cerai mati	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2014	35,0	61,9	0,9	2,2	100,0

Sumber: Susenas 2014

Dari tabel di atas tercatat bahwa penduduk 10 tahun ke atas sebagian besar berstatus kawin dengan proporsi sekitar 35,0 persen. Jika dirinci menurut kelompok umur tercatat 1,45 persen penduduk usia 10-19 tahun telah berstatus kawin. Selayaknya penduduk pada kelompok umur ini masih bersekolah. Hal ini menjelaskan bahwa masih terjadi perkawinan di usia muda (10-19 tahun) yang rentan akan perceraian. Selain itu, perkawinan dini juga identik dengan persalinan yang berisiko sehingga berakibat pada kematian ibu dan bayi.

Tabel 2.5
Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Kelompok Umur dan
Status Perkawinan (persen), 2014

Kelompok Umur	Status perkawinan			
	Belum kawin	Kawin	Cerai hidup	Cerai mati
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10-19	98,63	1,37	-	-
20-49	12,98	84,96	1,19	0,86
50+	0,00	87,81	1,15	11,04
Total	35,00	61,90	0,90	2,20

Sumber: Susenas 2014

2.4.2 Umur Perkawinan Pertama

Umur perkawinan pertama merupakan salah satu indikator penting yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya kesehatan ibu, kesehatan bayi, serta angka perceraian. Seorang wanita yang berumur kurang dari 16 tahun dianggap belum siap untuk memasuki kehidupan rumah tangga. Usia yang dianggap cukup matang memasuki kehidupan rumah tangga adalah antara 19 tahun sampai 24 tahun.

Tabel 2.6
Wanita Pernah Kawin Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Umur
Perkawinan Pertama (persen), 2014

Tahun	Umur (tahun)				Rata-rata
	<= 16	17-18	19-24	25+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2014	12,84	27,26	49,87	10,03	19,81

Sumber: Susenas 2014

Tabel 2.6 menunjukkan persentase wanita pernah kawin (wanita berstatus kawin/cerai hidup/cerai mati) usia 15 tahun ke atas menurut umur pada saat pertama kali melakukan perkawinan. Dari tabel di atas terlihat bahwa umur perkawinan pertama dari wanita pernah kawin. Paling banyak wanita melakukan perkawinan pertama kali pada saat umur 19-24 tahun. Secara rata-rata wanita kawin pertama kali pada umur 19 tahun sampai 20 tahun, usia yang cukup matang tapi juga masih terbilang sangat muda. Pada tahun 2014, wanita yang menikah dini (≤ 16 tahun) persentasenya sebesar 12,84 persen.

2.5 Tingkat Kelahiran

Tabel 2.7
Rata-Rata Anak Yang Pernah Dilahirkan per Wanita
Menurut Kelompok Umur Ibu, 2014

Kelompok Umur Ibu	Rata-Rata Anak yang Pernah Dilahirkan
(1)	(2)
15 – 19	0,11
20 – 24	0,93
25 – 29	1,52
30 – 34	2,72
35 – 39	3,40
40 – 44	3,62
45 – 49	4,29

Sumber: Susenas 2014

Ukuran tingkat kelahiran sangat beragam, namun di sini hanya dibahas tentang rata-rata anak yang pernah dilahirkan hidup oleh ibu umur 15-

49 tahun. Tabel 2.7 di bawah menunjukkan angka rata-rata anak yang pernah dilahirkan hidup pada kelompok umur ibu 15-49 tahun. Pada tahun 2014 seorang ibu akan memiliki satu anak pada umur 15-24 tahun dan pada umur 25-29 tahun akan memiliki antara satu dan dua anak. Jika umur fertilitas seorang ibu diasumsikan sampai pada 49 tahun maka rata-rata jumlah anak yang dilahirkan adalah 4 sampai 5 anak.

2.6 Keluarga Berencana

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu sarana untuk mengendalikan jumlah penduduk terutama untuk menekan angka kelahiran yang akhirnya akan menurunkan laju pertumbuhan penduduk.

Sejak era otonomi daerah digulirkan, kebijakan kependudukan bersifat desentralisasi, sehingga pelaksanaan program KB mengalami banyak kemunduran. Meskipun sudah ada upaya revitalisasi program KB nasional sejak tahun 2009 namun belum menunjukkan hasil yang memuaskan.

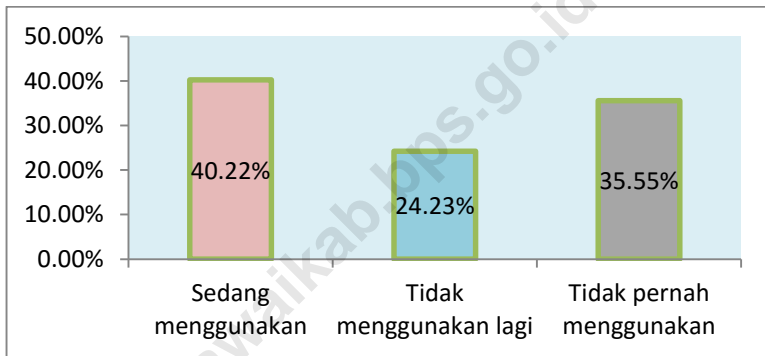
Estimasi data Susenas 2014 menunjukkan bahwa wanita pernah kawin yang sedang menggunakan alat KB sebesar 40,22 persen, 24,23 persen tidak menggunakan KB lagi dan sebanyak 35,55 persen wanita pernah kawin tidak pernah menggunakan KB. Hal ini tentu sangat riskan jika terjadi pada kelompok ibu-ibu muda dimana periode reproduksinya masih panjang.

Pada tahun 2014 dari seluruh wanita pernah kawin yang sedang menggunakan alat/cara KB, metode Suntik KB merupakan metode KB yang paling diminati oleh wanita pengguna KB. Hal ini terlihat dari persentase pengguna KB Suntik yang mencapai 48,41 persen.

Sementara itu, metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) yang saat ini sedang aktif digalakkan dan dianggap lebih efektif untuk menekan laju

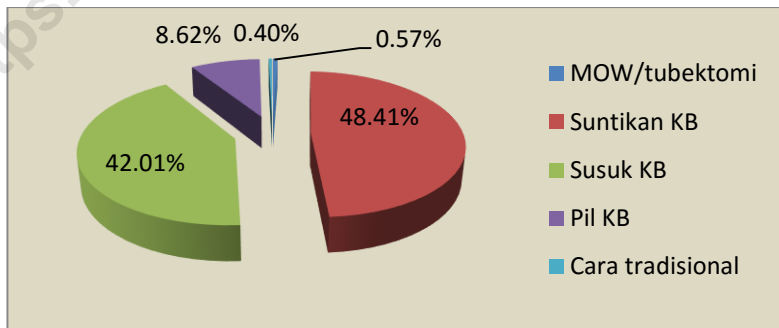
pertumbuhan penduduk belum begitu diminati. Tahun 2014 MKJP baru digunakan oleh sekitar 42,58 persen akseptor KB, masing-masing Susuk KB yang dipakai oleh 42,01 persen, Tubektomi 0,57 persen.

Gambar 2.3
Wanita Pernah Kawin Menurut Penggunaan Alat/Cara KB (persen), 2014



Sumber: Susenas 2014

Gambar 2.4
Pengguna KB Menurut Alat/Cara KB (persen), 2014



Sumber: Susenas 2014

3

*Kesehatan dan
Gizi*

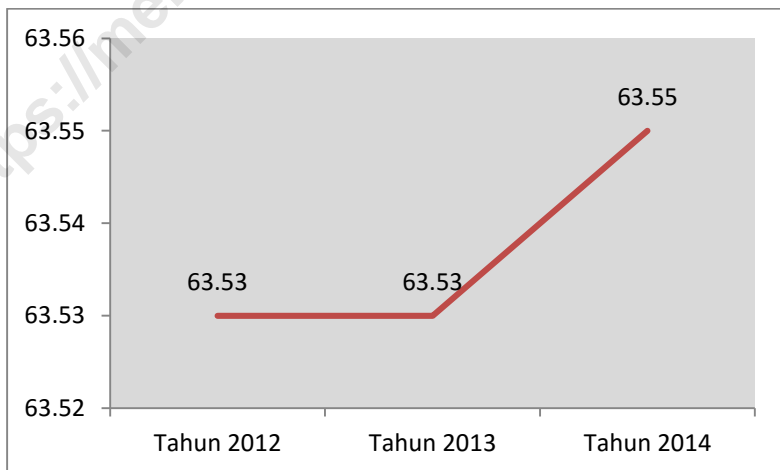
<https://mentawai.kab.bps.go.id>

BAB III KESEHATAN DAN GIZI

3.1 Angka Kematian Bayi dan Angka Harapan Hidup

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat salah satunya ditandai dengan meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH). Sepanjang tahun 2012-2014 angka harapan hidup penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan peningkatan yaitu dari 63,53 tahun pada tahun 2012 menjadi 63,55 tahun pada tahun 2014. Hal ini berarti pada tahun 2014 rata-rata penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai diperkirakan akan dapat hidup selama 63,55 tahun dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.

Gambar 3.1
Angka Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai (tahun), 2012 – 2014



Sumber: Badan Pusat Statistik (metode IPM baru)

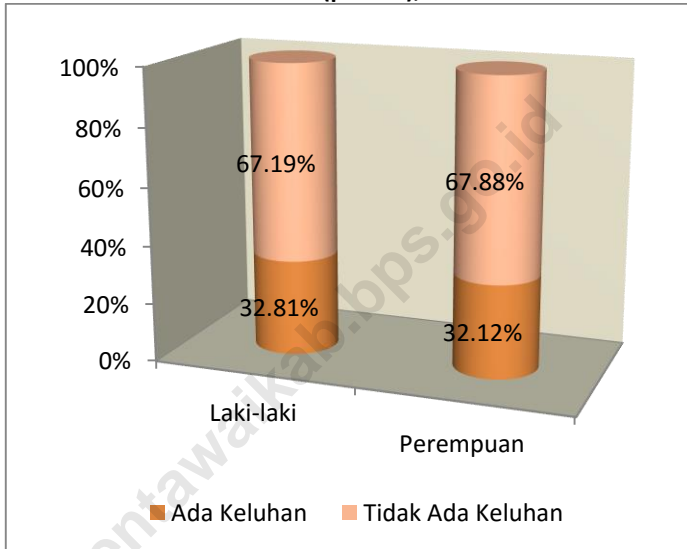
3.2 Morbiditas (Angka Kesakitan)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) morbiditas berarti tingkat yang sakit dan yang sehat dari suatu populasi. Angka Kesakitan/Morbiditas diukur dengan persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan menyebabkan terganggunya pekerjaan, sekolah atau kegiatan sehari-hari. Referensi waktu dari adanya keluhan kesehatan tersebut adalah sebulan terakhir sebelum pencacahan. Keluhan kesehatan adalah gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari.

Pada umumnya keluhan kesehatan utama yang banyak dialami oleh penduduk adalah panas, sakit kepala, batuk, pilek, diare, asma/sesak nafas, sakit gigi. Orang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada waktu survei (satu bulan terakhir) yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya.

Selama tahun 2014, penduduk Kepulauan Mentawai yang mengalami keluhan kesehatan tercatat sebesar 32,47 persen. Selain karena faktor perubahan iklim/cuaca, meningkatnya penduduk yang mengalami keluhan kesehatan mungkin disebabkan oleh budaya hidup bersih yang masih rendah di lingkungan masyarakat. Berbagai penyuluhan kesehatan masyarakat dimulai dari sanitasi lingkungan rumah hingga sanitasi lingkungan masyarakat seperti kebiasaan membuang sampah masih perlu dilaksanakan agar penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai lebih waspada terhadap berbagai macam penyakit akibat perilaku hidup tidak bersih.

Gambar 3.2
Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Jenis Kelamin (persen), 2014



Sumber: Susenas 2014

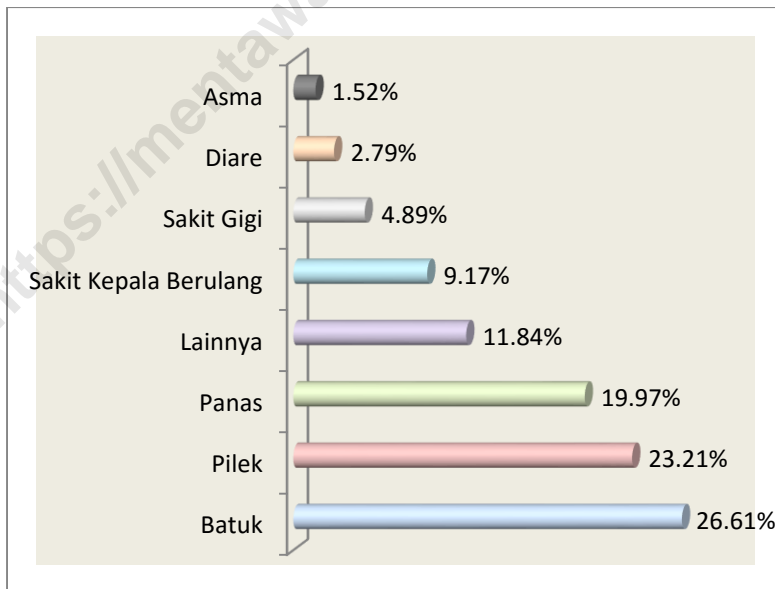
Dilihat menurut jenis kelamin, persentase laki-laki yang mengalami keluhan kesehatan relatif lebih tinggi dari pada perempuan. Hal ini disebabkan karena pada umumnya laki-laki berperan sebagai kepala rumah tangga yang harus bekerja keras untuk mencari penghidupan di luar. Selain itu, laki-laki umumnya lebih berperilaku hidup tidak sehat seperti merokok dan makan minum sembarangan serta cenderung untuk mengabaikan gejala penyakit sehingga lebih mudah untuk sakit.

Jika dilihat persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan dan menyebabkan terganggunya pekerjaan, sekolah atau kegiatan sehari-hari lainnya pada tahun 2014 tercatat sebesar 58,30 persen mengganggu pekerjaan, sekolah, atau kegiatan sehari-hari. Sementara

itu rata-rata lamanya sakit atau terganggu pekerjaan, sekolah atau kegiatan sehari-hari berkisar pada angka 5 s.d 6 hari.

Tingginya persentase penduduk yang aktivitas sehari-harinya terganggu dan cukup lamanya rata-rata lama terganggu tentu membawa dampak negatif. Terganggunya aktivitas sehari-hari dan lamanya terganggu bisa jadi merupakan indikasi bahwa gangguan kesehatan yang dialami cukup serius. Selain itu juga berdampak pada kerugian yang materil dan immaterial. Pekerja tidak dapat bekerja yang berarti mungkin tidak akan memperoleh penghasilan. Siswa tidak dapat bersekolah yang artinya tidak lengkap materi pembelajaran yang diterima oleh siswa/tertinggal pelajarannya.

Gambar 3.3
Jenis Keluhan Kesehatan yang dialami Penduduk (persen), 2014



Sumber: Susenas 2014

Jika dilihat dari jenis keluhan yang diderita penduduk/masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2014, maka keluhan kesehatan yang paling banyak dirasakan adalah batuk (26,61 persen), pilek (23,21 persen) dan panas (19,0 persen).

3.3 Penolong Kelahiran/Persalinan

Salah satu peran pemerintah yang penting dalam bidang kesehatan adalah menyediakan tenaga medis yang memadai baik dari segi jumlah, keahlian maupun jangkauannya untuk menolong proses persalinan. Tidak kalah penting adalah memberikan penyuluhan untuk mendorong masyarakat agar menggunakan tenaga medis saat persalinan. Meneruskan program dukun terlatih juga merupakan alternatif lain untuk menjamin keselamatan ibu dan bayi saat proses persalinan. Dengan demikian diharapkan dapat menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi pada saat persalinan.

Tabel 3.1
Penolong Persalinan Menurut Status Desa/Kota (persen), 2014

Penolong Pesalinan	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan + Pedesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tenaga Kesehatan	73,59	46,52	49,18
Dokter	20,43	6,08	7,49
Bidan	53,16	40,44	41,69
Tenaga paramedis lain	0,00	0,00	0,00
Bukan Tenaga Kesehatan	26,41	53,48	50,82
Dukun bersalin	26,41	46,67	44,68
Famili/keluarga & Lainnya	0,00	6,81	6,14

Sumber: Susenas 2014

Berdasarkan data Susenas 2014, persentase penolong terakhir persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan sebesar 49,18 persen. Penolong persalinan yang paling banyak digunakan adalah dukun bersalin (44,68 persen).

Dari tabel 3.1 di atas terlihat semua persalinan di wilayah perkotaan lebih banyak memanfaatkan tenaga medis. Sementara di wilayah perdesaan, persalinan dengan tenaga non medis dalam hal ini dukun bersalin masih cukup tinggi, yaitu mencapai 46,67 persen. Perlu dilihat lebih jauh apakah tenaga dukun bersalin tersebut sudah terlatih atau belum. Apakah masyarakat menggunakan tenaga dukun karena faktor kepercayaan atau karena murahnya biaya atau karena tenaga medis dalam persalinan di wilayah perdesaan tidak tersedia/tidak terjangkau. Semuanya menjadi bahan evaluasi bagi pihak terkait dalam rangka penyempurnaan program kesehatan guna menekan angka kematian bayi dan angka kematian ibu.

3.4 Pemberian ASI dan Imunisasi

Air Susu Ibu (ASI) merupakan zat makanan terbaik bagi bayi, terutama pada 6 bulan pertama masa pertumbuhan. ASI yang pertama kali keluar (kolostrum) kaya zat gizi dan mengandung zat kekebalan yang baik untuk pertahanan tubuh bayi dalam melawan penyakit dan tidak dimiliki oleh susu lainnya. ASI mengandung nutrisi yang dibutuhkan bayi dalam jumlah dan komposisi yang tepat sesuai dengan kebutuhan bayi dan perkembangan usianya.

Interaksi selama menyusui akan berpengaruh terhadap aspek psikologi ibu dan bayi. Ikatan kasih sayang antara keduanya akan semakin erat. Menyusui bayi juga sangat ekonomis karena tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membeli susu formula dan perlengkapannya. Selain itu, menyusui secara eksklusif dapat menunda haid sehingga berfungsi sebagai kontrasepsi alami yang dikenal sebagai Metode Amenorhea Laktasi (MAL).

Tahun 2014, 98,72 persen balita usia 2-4 tahun pernah diberi ASI, dimana 99,52 balita laki-laki usia 2-4 tahun diberikan ASI dan sebesar 97,70 persen balita perempuan usia 2-4 tahun yang diberi ASI.

Lamanya pemberian ASI juga mempengaruhi derajat kesehatan balita. Sebagian besar balita disusui selama 13-18 bulan (35,07 persen). Dari sisi kesehatan dianjurkan untuk menyusui bayi hingga usia 2 tahun agar proses tumbuh kembang bayi dapat berjalan secara maksimal. Akan tetapi, sepanjang tahun 2014 data Susenas menunjukkan rata-rata lama balita usia 2-4 tahun disusui baru mencapai 14 sampai 15 bulan. Dengan demikian diperlukan kerja keras agar masyarakat menyadari arti pentingnya ASI bagi balita sehingga lama pemberian ASI pada balita sesuai dengan anjuran kesehatan dapat dipenuhi.

Tabel 3.2
Balita Umur 2-4 Tahun Menurut Lamanya Menyusui (persen), 2014

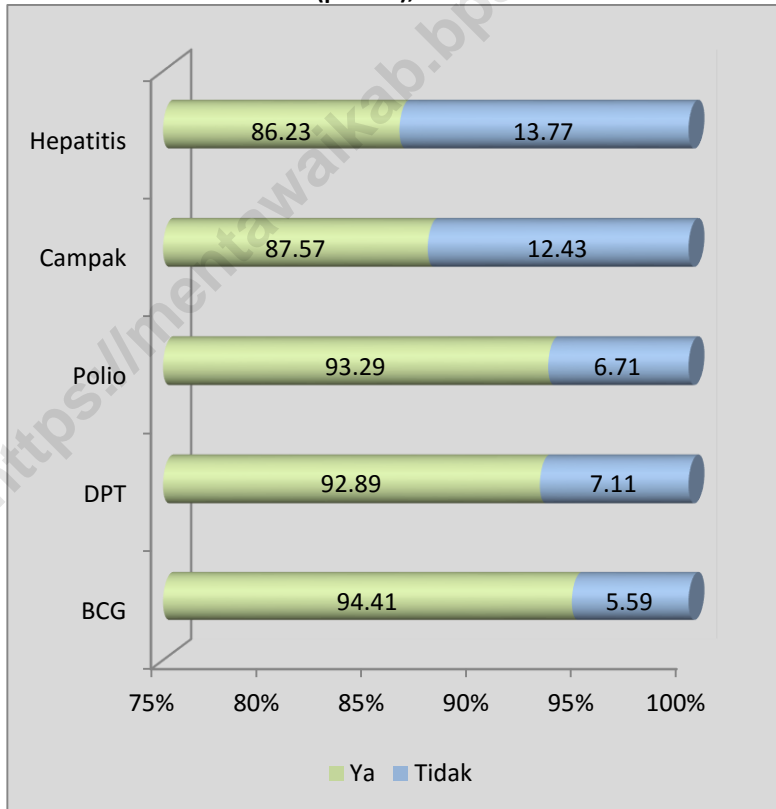
Tahun	Bulan					Rata-rata
	<= 6	7-12	13-18	19-24	25 +	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2014	10,97	29,00	35,07	22,25	2,71	14,68

Sumber: Susenas 2014

Selain pemberian ASI, pemberian imunisasi juga sangat penting bagi balita. Imunisasi bertujuan untuk membangun dan mempertahankan sistem kekebalan tubuh agar tidak mudah terserang penyakit. Sampai dengan usia 12 bulan seharusnya bayi telah mendapat imunisasi lengkap yaitu minimal 1 (satu) kali imunisasi BCG, 4 (empat) kali imunisasi Hepatitis B, 3 (tiga) kali imunisasi DPT, 4 (empat) kali imunisasi Polio dan 1 (satu) kali imunisasi Campak.

Dalam kurun waktu dua tahun (2013-2014) persentase balita yang mendapat imunisasi menunjukkan perkembangan yang positif. Akan tetapi, perlu dicermati perihal cakupan imunisasi yang diterima balita, apakah sudah lengkap atau belum. Data Susenas 2014 menunjukkan bahwa baru 49,30 persen dari semua balita usia satu tahun keatas yang mendapatkan imunisasi lengkap. Selain itu perlu juga diperhatikan ketepatan waktu pemberian imunisasi sesuai umur bayi.

Gambar 3.6
Balita Usia 1 -4 Tahun Menurut Jenis Imunisasi yang Pernah Diterima (persen), 2014



Sumber: Susenas 2014

3.5 Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan

Peningkatan tingkat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari kesadaran masyarakat untuk mengobati keluhan kesehatan yang dirasakannya, baik berobat sendiri maupun berobat jalan.

Persentase penduduk yang berobat sendiri pada tahun 2014 sebesar 68,30 persen. Penurunan berobat sendiri akan baik jika penduduk beralih ke berobat jalan di fasilitas-fasilitas kesehatan. Jika tidak, hal ini berarti penduduk cenderung mengabaikan atau tidak begitu memperdulikan keluhan/penyakitnya sehingga mungkin akan memperparah kondisi kesehatannya. Obat dibedakan atas obat modern dan obat tradisional. Obat modern adalah obat yang digunakan dalam sistem kedokteran Barat, dapat berbentuk tablet, kaplet, sirup, puyer, salep, suppositoria (misal obat wasir), biasanya sudah dalam bentuk jadi buatan pabrik farmasi, dengan kemasan bernomor kode pendaftaran di Depkes yang dimulai dengan 1-3 huruf diikuti angka-angka, huruf-hurufnya adalah DTL (Nama Dagang Obat Terbatas Lokal), DKL (Nama Dagang Obat Keras Lokal), DBL (Nama Dagang Obat Bebas Luar), dan lain-lain; ada yang harus dibeli dengan resep dokter di apotik (walaupun kenyataannya bisa tanpa resep atau bisa dibeli di luar apotik, misal kapsul tetra, obat penenang), ada yang bisa dibeli bebas di apotik, toko obat, depot obat, ataupun warung (misal berbagai merek obat flu, berbagai merek obat sakit kepala). Obat tradisional adalah obat-obatan yang diolah secara tradisional, turun-temurun, berdasarkan resep nenek moyang, adat-istiadat, kepercayaan, atau kebiasaan setempat, baik bersifat *magic* maupun pengetahuan tradisional.

Dari jenis obat yang dipakai penduduk untuk berobat sendiri pada tahun 2014 obat modern menjadi pilihan utama untuk mengobati keluhan kesehatannya di wilayah perkotaan yaitu tercatat sebesar 93,47 persen dan obat modern + tradisional menjadi pilihan utama untuk masyarakat perdesaan yaitu tercatat sebesar 43,51 persen.

Tabel 3.3
Penduduk yang Berobat Sendiri Menurut Jenis Obat (persen), 2014

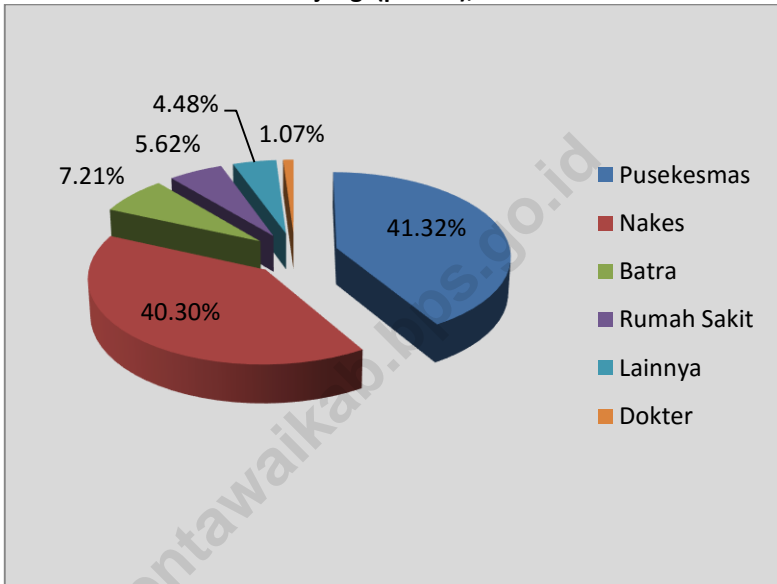
Jenis Obat	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan + Pedesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Modern	93.47	20.88	29.76
Tradisional	0.18	23.99	21.08
Lainnya	0.00	6.80	5.97
Modern + Tradisional	6.36	43.51	38.96
Modern + Lainnya	0.00	0.43	0.38
Tradisional + Lainnya	0.00	0.52	0.45
Modern + Trad.+ Lainnya	0.00	3.87	3.40

Sumber: Susenas 2014

Di samping kesadaran penduduk untuk berobat sendiri, ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan juga merupakan salah satu faktor penentu terwujudnya peningkatan derajat dan status kesehatan penduduk. Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu) merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan karena mampu menjangkau daerah-daerah pelosok. Meskipun begitu, kesadaran penduduk untuk berobat pada fasilitas kesehatan juga sangat menentukan tingkat/derajat kesehatan masyarakat. Akan menjadi percuma jika sudah ada fasilitas kesehatan yang dibangun tetapi pemanfaatan fasilitas tersebut sangat minim.

Dari seluruh penduduk yang mengalami keluhan kesehatan, 43,22 persen berobat jalan ke fasilitas kesehatan. Puskesmas menjadi pilihan utama penduduk untuk berobat jalan yaitu sebanyak 41,32 persen, kemudian Nakes (40,30 persen) dan batra (7,21 persen). Untuk selengkapnya dapat dilihat pada gambar 3.7.

Gambar 3.7
Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Fasilitas Kesehatan yang Dikunjungi (persen), 2014



Sumber: Susenas, 2014

4

Pendidikan

<https://mentawai.kab.bps.go.id>

BAB IV

PENDIDIKAN

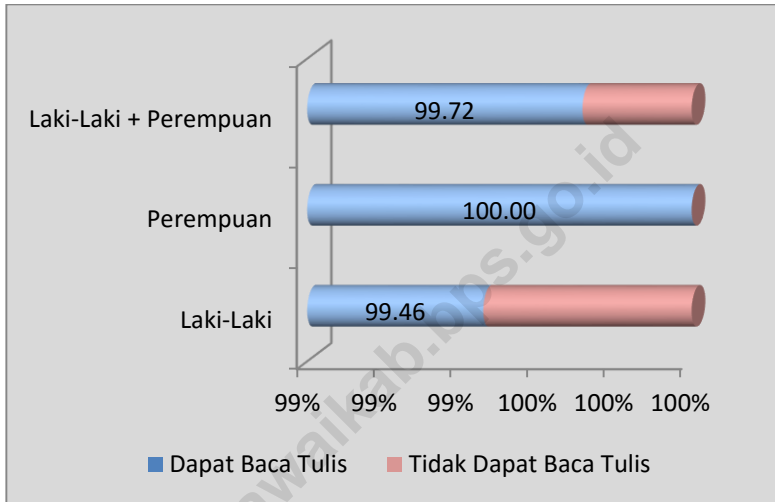
Salah satu tujuan dari pembangunan adalah membangun manusia itu sendiri. Pembangunan manusia dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah dengan pendidikan. Untuk itu pemerintah harus berupaya untuk mengurangi kesenjangan kesempatan memperoleh pendidikan dengan menambah gedung sekolah, menekan biaya sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (khususnya pendidikan) adalah dengan mencanangkan program Wajib Belajar (wajib) 9 tahun. Dengan program tersebut setiap anak diwajibkan untuk memperoleh pendidikan sampai tamat SLTP (atau selama 9 tahun). Tingkat pencapaian program pembangunan pendidikan masyarakat secara umum dapat diukur melalui perubahan dan perkembangan tingkat pendidikan yang berhasil dicapai masyarakat dalam periode waktu tertentu. Hasil pembangunan pendidikan masyarakat dapat dilihat melalui beberapa indikator-indikator output antara lain Angka Melek Huruf (AMH), Angka Partisipasi Sekolah (APS), tingkat/jenjang pendidikan yang ditamatkan dan rata-rata lama sekolah.

4.1 Angka Melek Huruf

Angka melek huruf merupakan salah satu indikator sederhana yang dapat menunjukkan perkembangan pembangunan pendidikan. Semakin besar angka melek huruf, berarti semakin banyak penduduk yang mengerti baca dan tulis. Dengan angka melek huruf yang tinggi (angka buta aksara rendah) menunjukkan pencapaian pendidikan dasar yang efektif dan berhasilnya program keaksaraan.

Gambar 4.1
Kemampuan Baca dan Tulis Penduduk Umur 15-64 Tahun Menurut
Jenis Kelamin (persen), 2014



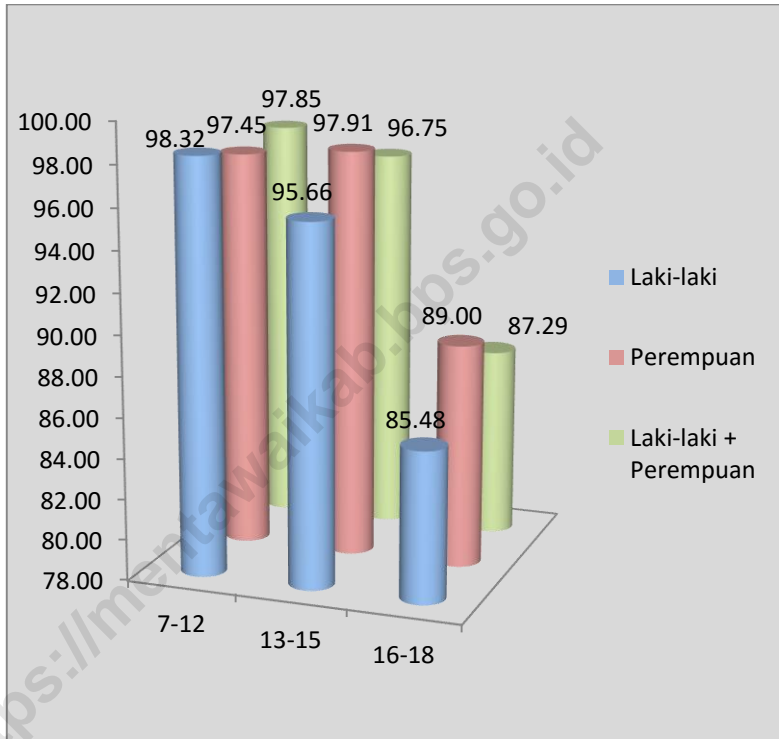
Sumber: Susenas 2014

AMH penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2014 tercatat sebesar 99,46 persen. Kemampuan baca dan tulis penduduk usia 15-64 tahun laki-laki lebih rendah daripada kemampuan baca dan tulis penduduk perempuan yaitu sebesar 99,46 persen berbanding 100 persen.

4.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Indikator yang bisa digunakan untuk mengetahui tingkat partisipasi anak usia sekolah dalam proses kegiatan belajar di pendidikan formal (sekolah) adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS juga bisa digunakan sebagai indikator untuk melihat seberapa besar kemampuan dan jangkauan lembaga pendidikan formal dalam menyerap/menarik penduduk khususnya anak usia sekolah untuk belajar.

Gambar 4.2
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (persen), 2014



Sumber: Susenas 2014

APS penduduk usia 7-12 tahun pada tahun 2014 adalah sebesar 97,85 persen. Artinya dari 100 anak usia 7-12 tahun terdapat sekitar 97 s.d 98 anak yang sedang bersekolah. Pada kelompok umur 13-15 tahun tercatat APS sebesar 96,75 persen. Pada kelompok umur 16-18 tahun tercatat APS sebesar 87,29 persen. Ditinjau dari aspek jenis kelamin, penduduk laki-laki memiliki APS yang lebih tinggi dari pada perempuan untuk kelompok umur 7-12 yaitu tercatat sebesar 98,32 persen berbanding 97,45 persen, sedangkan untuk kelompok umur 13-15 tahun dan 16-18 tahun perempuan lebih tinggi APS dibandingkan laki-

laki, yaitu dan 97,91 persen berbanding 95,66 persen untuk kelompok umur 13-15 dan 89 persen berbanding 85,48 persen untuk kelompok umu 16-18 tahun.

Tabel 4.1
Angka Partisipasi Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur
(persen), 2014

Jenis Partisipasi (1)	Jenis Kelamin (2)	Kelompok Umur		
		SD (3)	SMP (4)	SMA (5)
APK	Laki-laki	125.44	75.67	70.27
	Perempuan	119.14	83.72	65.70
	Laki-laki + Perempuan	122.01	79.53	67.92
APM	Laki-laki	98.32	55.73	53.62
	Perempuan	95.22	54.54	53.43
	Laki-laki + Perempuan	96.63	55.16	53.52

Sumber: Susenas 2014

Tabel 4.1 menggambarkan bahwa untuk tingkat SMP dan SMA capaian APK dan APM di Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2014 baru mencapai masing-masing sekitar 55,16 persen dan 53,52 persen. Hal ini menjadi indikasi bahwa program wajib belajar (wajib) 9 tahun masih belum menunjukkan hasil yang maksimal. Masih banyak anak-anak yang semestinya mengenyam pendidikan dasar ternyata tidak bersekolah.

4.3 Rata-Rata Lama Sekolah

Keberhasilan wajib belajar 9 tahun juga dapat diketahui dengan indikator rata-rata lama sekolah. Indikator tersebut digunakan untuk mengetahui lama tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas di bangku pendidikan formal.

Berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan metode baru, rata-rata lama sekolah tahun 2013 adalah sebesar 6,17 tahun, meningkat menjadi 6,19 tahun pada tahun 2014. Artinya penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai rata-rata hanya mampu menempuh pendidikan sampai dengan kelas 6/tamat Sekolah Dasar (SD). Hal ini berarti program Wajib Belajar 9 tahun belum sepenuhnya tercapai.

Tabel 4.2
Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin (persen), 2014

Jenis Kelamin	Ijazah Tertinggi yang Dimiliki					
	Tidak Punya Ijazah	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	Diploma I/II/III	D. IV s.d S3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Laki-laki	27.78	29.74	20.61	17.69	1.01	3.17
Perempuan	31.61	30.22	19.78	14.78	1.58	2.03
Laki-laki + Perempuan	29.56	29.96	20.23	16.34	1.28	2.64

Sumber: Susenas 2014

Keberhasilan program pembangunan pendidikan juga dapat dilihat dari pendidikan yang ditamatkan sebagian besar penduduk. Berdasarkan data Susenas 2014 pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk usia 15 tahun ke atas adalah tidak tamat SD (29,56 persen) dan tamat

SD/ sederajat (29,96 persen). Pada jenjang pendidikan menengah dan dasar (SMA ke bawah) persentase ijazah tertinggi yang ditamatkan penduduk laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.2.

Dari beragam indikator pendidikan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai masih rendah. Program wajib belajar belum tercapai, sebagian besar penduduk hanya berpendidikan SD atau hanya sampai kelas 1 SMP secara rata-rata. Mengingat banyaknya program bantuan pemerintah dalam upaya menyukseskan program wajib belajar 9 tahun, tentu menjadi tanda tanya besar apa yang menjadi penyebab Angka Partisipasi Murni (APM) yang rendah. Evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program-program tersebut diperlukan guna mencari solusi yang tepat. Diperlukan kerja keras pemerintah untuk menuntaskan program tersebut baik dari segi infrastruktur sekolah, keterjangkauan wilayah, maupun keterjangkauan biaya pendidikan.

5

Ketenagakerjaan

<https://mentawai.kab.bps.go.id>

BAB V KETENAGAKERJAAN

Salah satu permasalahan yang dihadapi pemerintah saat ini adalah penyediaan lapangan kerja atau usaha yang layak. Permasalahan tersebut mengandung arti penyediaan lapangan pekerjaan baru bagi penduduk yang belum bekerja dan peningkatan produktivitas kerja. Penyediaan lapangan pekerjaan sangat diperlukan untuk mengurangi tingkat pengangguran. Data ketenagakerjaan dalam bab ini menggunakan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).

Tabel 5.1
Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Utama
Selama Seminggu yang Lalu (persen), 2014

Kegiatan Utama	Jumlah
(1)	(2)
Angkatan Kerja	75,47
Bekerja	98,34
Pengangguran	1,66
Bukan Angkatan Kerja	24,53
Sekolah	40,76
Mengurus Rumah Tangga	49,95
Lainnya	9,29
Usia Kerja	63,06

Sumber: Sakernas 2014

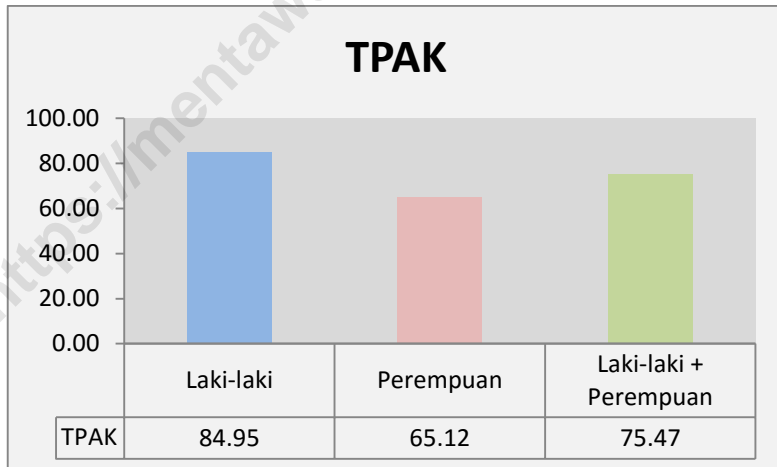
Secara umum keadaan ketenagakerjaan di Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2014 terlihat seperti pada tabel 5.1 di atas. Jumlah penduduk angkatan kerja yang bekerja pada tahun 2014 sebanyak 98,34 persen, jumlah penduduk yang menganggur sebanyak 1,66

persen. Persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 75,47 persen, atau 39.934 jiwa dari 52.911 jiwa penduduk usia kerja (Sakernas 2014).

5.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi dilihat dari proporsi penduduk yang masuk ke dalam pasar kerja (bekerja maupun mencari pekerjaan) disebut sebagai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Gambar 5.1
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin
(persen), 2014



Sumber: Sakernas 2014

Pada tahun 2014, TPAK Kabupaten Kepulauan Mentawai tercatat sebesar 75,47 persen. TPAK perempuan lebih rendah dari pada TPAK laki-laki. Hal ini menunjukkan keterlibatan perempuan pada kegiatan ekonomi (pasar kerja) lebih rendah dari pada laki-laki. TPAK laki-laki

pada tahun 2014 sebesar 84,95 persen sementara TPAK perempuan hanya sebesar 65,12 persen.

5.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase penduduk yang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, dan yang tidak mencari pekerjaan atau tidak mempersiapkan usaha karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan karena sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Besarnya angka pengangguran terbuka mempunyai dampak sosial yang luas karena mereka yang tidak bekerja biasanya tidak mempunyai pendapatan. Semakin tinggi angka pengangguran terbuka maka semakin besar potensi kemiskinan dan kerawanan sosial yang ditimbulkannya.

TPT tahun 2014 tercatat sebesar 1,66 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, satu atau dua di antaranya adalah penganggur. TPT laki-laki (seperti terlihat pada tabel 5.2) sebesar 2,45 persen dan TPT perempuan sebesar 0,54 persen. Rendahnya angka TPT di Kabupaten Kepulauan Mentawai diakibatkan karena hampir semua rumah tangga di Kabupaten Kepulauan Mentawai mengusahakan pertanian tanaman pangan. Dalam konsep ketenagakerjaan yang digunakan dalam Survei Angkatan kerja Nasional (Sakernas), anggota rumah tangga yang mengusahakan pertanian tanaman pangan walaupun untuk konsumsi sendiri termasuk ke dalam kategori bekerja. Adapun contoh dari pertanian tanaman pangan antara lain Padi-padian, Palawija, Umbi-umbian dan Sagu.

Tabel 5.2
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin (persen),
2014

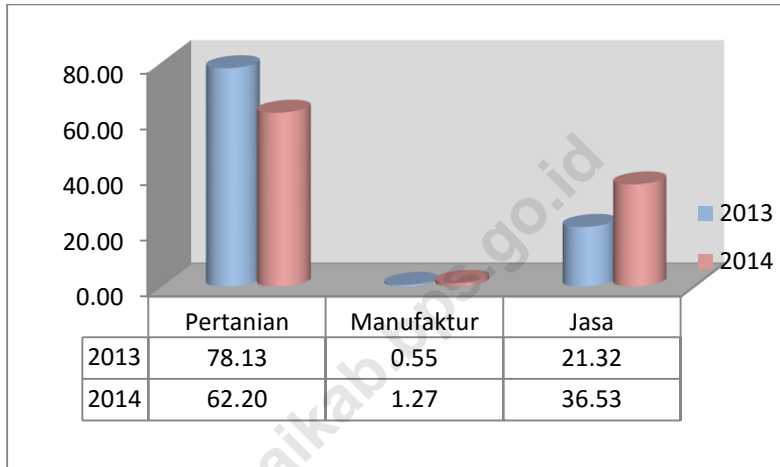
Jenis Kelamin	TPT
(1)	(2)
Laki-laki	2,45
Perempuan	0,54
Laki-laki + Perempuan	1,66

Sumber: Sakernas 2014

5.3 Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan

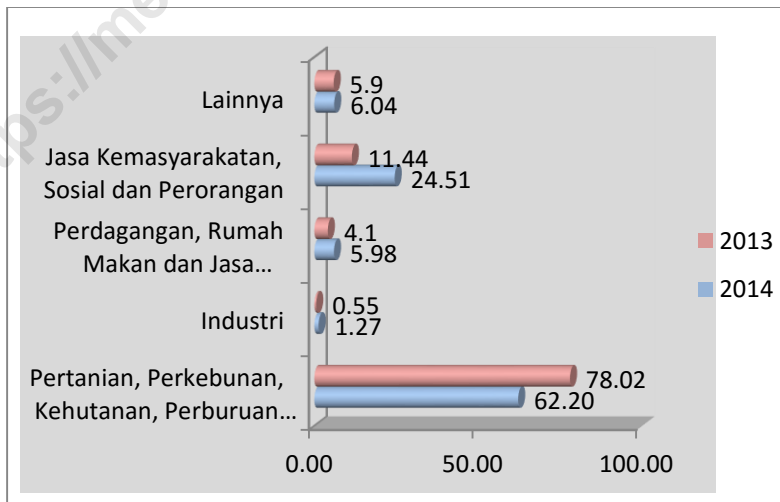
Pola lapangan usaha sebagian besar penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai masih berada pada sektor primer yaitu sektor usaha yang menggambarkan masyarakat agraris terdiri dari pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, perburuan, perikanan dan peternakan. Pada tahun 2014 sebesar 62,12 persen tenaga kerja bergerak di sektor pertanian, hal ini turun sebesar 15,93 persen dibandingkan dengan tahun 2013. Melihat perkembangan pada dua tahun terakhir distribusi persentase lapangan usaha masyarakat di sektor primer cukup stabil sementara sektor manufaktur Sebesar 1,27 persen tenaga kerja bergerak di sector manufaktur atau naik sebesar 0,68 persen dibanding dengan tahun 2013. Sementara itu sektor Jasa(perdagangan, rumah makan, jasa akomodasi, transportasi, pergudangan, komunikasi, lembaga keuangan, real estate, persewaan, jasa perusahaan, dan jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan) pada tahun 2014 sebesar 36,53 persen atau naik sebesar 15,19 persen dari tahun 2013.

Gambar 5.3
Penduduk Bekerja Menurut Klasifikasi Lapangan Usaha (persen),
2013-2014



Sumber: Sakernas 2013-2014

Gambar 5.4
Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha (persen), 2013-2014



Sumber: Sakernas 2013-2014

Dirinci lebih detail dari setiap lapangan usaha, maka sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, perikanan dan peternakan merupakan lapangan usaha terbanyak dari penduduk yang mencapai tiga perlima dari total penduduk bekerja (62,12 persen), disusul sector jasa kemasyarakatan, social dan perorangan (24,51 persen) dan perdagangan sebesar 5.98 persen. Untuk lebih lengkapnya tentang persentase masing-masing lapangan usaha dapat dilihat pada gambar 5.4.

Sebagian besar penduduk Kepulauan Mentawai bekerja dengan status berusaha sendiri. Hal ini wajar mengingat sektor pertanian merupakan sektor yang paling banyak di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu dari 10,65 persen pada tahun 2013 menjadi 27,33 persen pada tahun 2014. Di sisi lain, persentase Pekerja Keluarga menurun dari 38,31 persen menjadi 24,87 persen.

Tabel 5.3
Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama (persen),
2013-2014

Status Pekerjaan Utama	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Berusaha Sendiri	10,65	27,33
Berusaha dibantu Buruh Tidak Tetap/ Buruh Tidak Dibayar	33,86	27,24
Berusaha dibantu Buruh Tetap/ Buruh Dibayar	0,82	1,08
Buruh/Karyawan/ Pegawai	12,60	13,36
Pekerja Bebas	3,75	6,12
Pekerja Keluarga/Pekerja Tak Dibayar	38,31	24.87

Sumber: Sakernas 2013-2014

5.4 Pendidikan

Berdasarkan pendidikan yang ditamatkan tenaga kerja, pada tahun 2014 di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 36,15 persen tenaga kerja belum memiliki ijazah, sedangkan yang memiliki pendidikan tinggi (Perguruan Tinggi) hanya sebesar 4,39 persen.

Secara umum, untuk tenaga kerja laki-laki sebesar 26,13 persen belum memiliki ijazah, 29,97 persen memiliki ijazah SD, 39,60 persen memiliki ijazah pendidikan menengah (SMP dan SMA) dan pekerja yang memiliki pendidikan tinggi (Perguruan Tinggi) sebesar 4,29 persen. Sedangkan tenaga kerja perempuan memiliki distribusi ijazah secara berturut-turut tidak memiliki ijazah sebesar 50,43 persen, SD sebesar 22,54 persen, pendidikan menengah sebesar 22,49 dan pendidikan tinggi sebesar 4,53 persen .

Tabel 5.4
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan yang ditamatkan (persen), 2014

Ijazah Tertinggi	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak Pernah/ Belum Tamat SD	26.13	50.43	36.15
SD sederajat	29.97	22.54	26.91
SMP sederajat	17.72	10.04	14.56
SMA sederajat	21.88	12.45	18.00
Perguruan Tinggi	4.29	4.53	4.39

Sumber: Sakernas 2014

6

*Pengeluaran dan
Kemiskinan*

<https://mentawai.kab.bps.go.id>

BAB VI PENGELUARAN DAN KEMISKINAN

6.1 Pengeluaran Rumah Tangga

Secara umum data konsumsi/pengeluaran rumah tangga pada Susenas dibagi dalam dua kelompok yaitu kelompok konsumsi/pengeluaran makanan dan konsumsi/pengeluaran bukan makanan. Tingkat kebutuhan konsumsi tersebut tentunya berbeda. Dalam kondisi pendapatan terbatas, sudah pasti akan mendahulukan konsumsi makanan dari pada bukan makanan. Seiring meningkatnya pendapatan, pola konsumsi rumah tangga berubah mulai dari menambah jumlah hingga meningkatkan kualitas konsumsi baik makanan maupun bukan makanan. Semakin sejahtera masyarakat biasanya ditandai lebih dominannya konsumsi bukan makanan (pendidikan, kesehatan, dll) daripada konsumsi makanan.

Tabel 6.1
Perkembangan Rata-rata Pengeluaran per Kapita per Bulan,
2013-2014

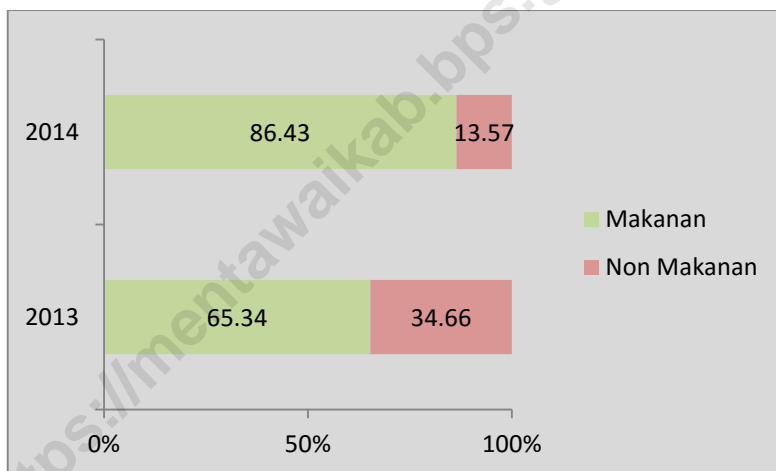
Tahun	Rata-rata Pengeluaran per Kapita per Bulan (Rp)	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)
2013	486.871	
2014	455.779	-6,39

Sumber: Susenas, 2013-2014

Selama periode tahun 2013-2014 rata-rata pengeluaran per kapita per bulan menurun dari Rp.486.871,- menjadi Rp.455.779,-. Penurunan dalam periode 2013-2014 adalah sebesar 6,39 persen. Penurunan bisa saja terjadi akibat adanya penurunan daya beli dari masyarakat itu sendiri atau terjadinya kenaikan harga barang yang tidak disertai dengan peningkatan penghasilan masyarakat itu sendiri.

Gambar 6.1 menyajikan komposisi pengeluaran per kapita per bulan dari tahun 2013 sampai tahun 2014. Secara keseluruhan persentase pengeluaran yang digunakan untuk konsumsi makanan masih lebih tinggi daripada konsumsi bukan makanan. Pada tahun 2014, 86,43 persen pengeluaran per kapita per bulan digunakan untuk makanan dan selebihnya untuk bukan makanan.

Gambar 6.1
Komposisi Pengeluaran per Kapita per Bulan Menurut Jenis Pengeluaran (persen), 2013-2014



Sumber: Susenas 2014

Jika dilihat lebih jauh, komoditas bahan makanan yang memiliki tingkat konsumsi (distribusi pengeluaran) terbesar adalah rokok, padi-padian dan ikan.

Tabel 6.2
Distribusi Pengeluaran Makanan dan Bukan Makanan per Kapita per Bulan, 2014

Jenis Pengeluaran	Pengeluaran per Kapita per Bulan	
	Nominal	Persentase
(1)	(2)	(3)
Padi-Padian	66,836.99	16.97
Umbi-Umbian	28,556.30	7.25
Ikan	51,307.76	13.02
Daging	8,609.89	2.19
Telur dan susu	11,702.04	2.97
Sayur-sayuran	43,675.95	11.09
Kacang-kacangan	2,083.70	0.53
Buah-buahan	24,937.06	6.33
Minyak dan lemak	21,261.87	5.40
Bahan minuman	24,928.42	6.33
Bumbu-bumbuan	6,531.80	1.66
Mie Instan dan lainnya	4,659.10	1.18
Makanan Jadi	28,312.46	7.19
Rokok	70,547.36	17.91
Makanan	393,950.70	100,00
Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	30,511.19	49.35
Barang dan Jasa	20,323.71	32.87
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala	4,174.83	6.75
Barang-barang tahan lama	1,877.74	3.04
Pajak dan asuransi	640.39	1.04
Keperluan pesta dan upacara	4,300.41	6.96
Bukan Makanan	61,828.27	100,00

Sumber: Susenas 2014

Selain makanan, rokok juga merupakan komoditas yang paling banyak dikonsumsi. Proporsi pengeluaran perkapita perbulan yang digunakan untuk mengkonsumsi rokok pada tahun 2014 adalah sebesar 17,91 persen. Patut dicermati kedepan untuk menggalakkan kampanye anti tembakau guna mengurangi konsumsi rokok sehingga dana yang ada dapat dialihkan untuk kebutuhan yang lain. Sementara itu, untuk konsumsi bukan makanan, pengeluaran terbesar adalah untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga sebesar 49,35 persen dan untuk belanja barang dan jasa yaitu sebesar 32,87 persen.

6.2 Kemiskinan

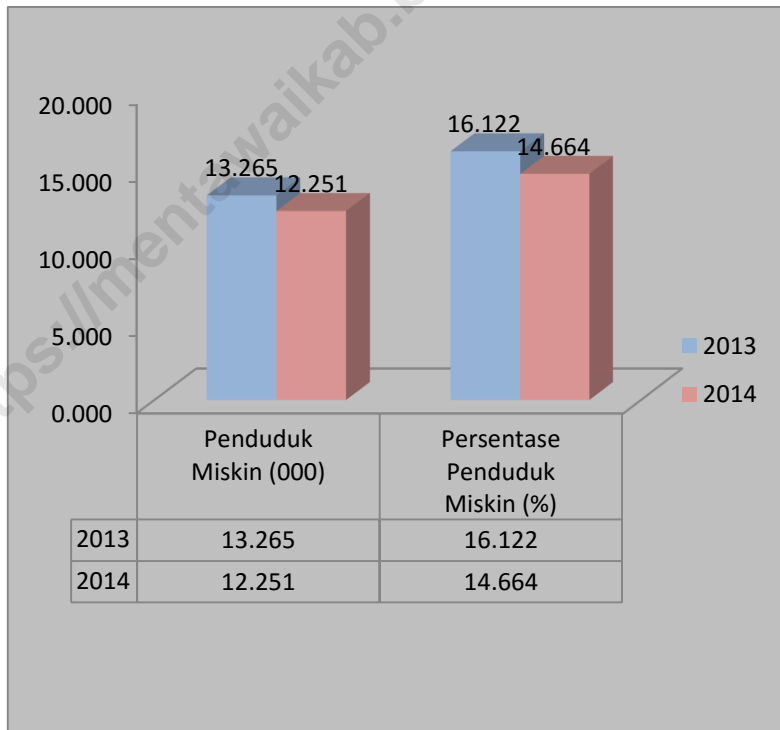
Dalam analisis kemiskinan terdapat beberapa indikator penting antara lain garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin/*headcount index* (HCI-P₀), indeks kedalaman kemiskinan/*poverty gap index* (P₁), dan indeks keparahan kemiskinan/*poverty severity index* (P₂).

BPS mendefinisikan garis kemiskinan sebagai nilai rupiah yang harus dikeluarkan seseorang dalam sebulan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar asupan kalori sebesar 2.100 Kkal/hari per kapita (garis kemiskinan makanan) ditambah kebutuhan minimum non makanan yang merupakan kebutuhan dasar seseorang, yaitu papan, sandang, sekolah, dan transportasi serta kebutuhan individu dan rumah tangga dasar lainnya (garis kemiskinan non makanan). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Sementara itu indeks keparahan kemiskinan menggambarkan penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.

Naiknya garis kemiskinan jika tidak disertai dengan kenaikan pendapatan penduduk miskin atau upaya serius pemerintah melalui program-program intervensi penanggulangan kemiskinan akan mengakibatkan peningkatan jumlah penduduk miskin. Sementara itu,

penurunan penduduk miskin meskipun ada kenaikan garis kemiskinan menggambarkan adanya kenaikan pendapatan (pengeluaran) dari penduduk miskin. Kenaikan pendapatan penduduk miskin yang lebih besar daripada kenaikan garis kemiskinan mengakibatkan penduduk-penduduk yang semula miskin atau semula berada dekat dengan garis kemiskinan dapat keluar atau terhindar dari kemiskinan. Hal ini tidak lepas dari upaya pemerintah maupun kemampuan penduduk miskin itu sendiri untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Gambar 6.2
Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Kepulauan
Mentawai, 2013-2014



Sumber: Badan Pusat Statistik (angka sementara)

Jumlah penduduk miskin atau penduduk dengan pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan di Kabupaten Kepulauan 12.251 orang atau turun 1.014 jiwa dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2013 sebanyak 13.265 orang. Secara persentase, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kepulauan Mentawai turun dari 16,12 persen menjadi 14.664 persen.

Tabel 6.3
Garis Kemiskinan (Rp/bulan/kapita), Jumlah (000) dan Persentase
Penduduk Miskin, 2013-2014

Indikator	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Jumlah Penduduk Miskin (000)	13,265	12,251
Persentase Penduduk Miskin (%)	16,122	14,664

Sumber: Badan Pusat Statistik (angka sementara)

7

*Perumahan dan
Lingkungan*

<https://mentawai.kab.bps.go.id>

BAB VII

PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

Selain sandang dan pangan, salah satu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi adalah rumah. Rumah merupakan kebutuhan primer yang harus dicukupi termasuk aspek sanitasinya. Saat ini rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung tetapi rumah sudah menjadi bagian dari gaya hidup dan menunjukkan identitas pemiliknya.

Secara umum kualitas rumah sebagai tempat tinggal menunjukkan tingkat kesejahteraan rumah tangga, dimana kualitas tersebut ditentukan oleh fisik rumah yang dapat terlihat dari fasilitas yang digunakan. Berbagai fasilitas yang mencerminkan kesejahteraan rumah tangga tersebut dapat dilihat dari jenis atap rumah, jenis lantai terluas, jenis dinding, sumber air minum dan fasilitas tempat buang air besar rumah tangga.

7.1 Kualitas Rumah Tempat Tinggal

Rumah dikatakan layak sebagai bangunan tempat tinggal apabila memiliki atap, lantai dan dinding yang layak. Ketiga unsur tersebut juga mengindikasikan tingkat kesejahteraan penghuninya. Berdasarkan data Susenas 2014, rumah yang berlantai bukan tanah di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 98,57 persen.

Indikator lain yang digunakan untuk melihat kualitas perumahan tempat tinggal adalah jenis atap dan jenis dinding. Atap dikatakan layak jika terbuat dari atap beton, genteng, seng, sirap dan asbes. Rumah dengan atap yang layak sebesar 71,80 persen. Masih terdapat sebesar 28,20 rumah di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang tidak layak (ijuk/rumbia) pada tahun 2014. Dinding dianggap permanen apabila berbahan tembok dan kayu, pada tahun 2014 rumah dengan dinding permanen di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 93,10 persen.

Tabel 7.1
Rumah Tangga Menurut Kualitas Perumahan (persen), 2014

Indikator Perumahan	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Lantai Bukan Tanah	98,57 %	99,70 %
Atap Layak *	64,04 %	71,80 %
Dinding Permanen **	94,49 %	93,10 %
Luas Lantai \geq 10 M ²	59,74 %	60,44 %

Sumber: Susenas 2013-2014

Catatan: * Atap Layak: Atap beton, Genteng, Seng, Sirap dan Asbes

** Dinding permanen: Tembok dan Kayu

Dari indikator luas lantai tempat tinggal, *World Health Organization* (WHO) menegaskan salah satu kriteria rumah sehat adalah rumah dengan luas lantai per orang minimal 10 m². Pada tahun 2014 rumah tempat tinggal dengan luas lantai perkapita \geq 10 m², sebanyak 60,44 persen.

7.2 Kualitas Air Minum dan Sanitasi Tempat Tinggal

Selain dari kondisi bangunan tempat tinggal, kualitas rumah juga dipengaruhi oleh kualitas fasilitas yang digunakan diantaranya adalah sumber air minum bersih dan adanya jamban sendiri.

Pada tahun 2014 rumah tangga yang menggunakan air minum layak sebagai sumber air minum sebesar 69,24 persen. Selain air kemasan dan air isi ulang, sumber air minum yang masuk dalam kategori bersih antara lain air ledeng, air sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung. Syarat sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung harus yang memiliki jarak minimal 10 meter dari

tempat pembuangan limbah terdekat. Dalam kategori tersebut, air bersih pada tahun 2014 sebesar 40,22 persen.

Tabel 7.2
Kualitas Air Minum dan Sanitasi Tempat Tinggal (persen), 2014

Indikator Kualitas Perumahan	2014
(1)	(2)
Air Minum Layak	69,24
Air Minum Bersih (Selain Air Kemasan & Isi Ulang) *	40,22
Jamban Sendiri	40,30

Sumber: Susenas 2014

Catatan: * Air Minum Bersih (Selain Air Kemasan dan Isi Ulang): Air Ledeng, Sumur Pompa/Bor, Sumur Terlindung, Mata Air Terlindung (Jarak Sumur/Mata Air ke tempat pembuangan limbah/tinja \geq 10 m)

Kualitas perumahan yang juga ditentukan oleh adanya jamban sendiri di rumah tersebut. Selama kurun waktu 2013-2014 rumah tangga yang mempunyai jamban sendiri meningkat dari 36,94 persen menjadi 40,0 persen. Terlihat pada tabel 7.3 sebanyak 49,53 persen rumah tangga di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2014 tidak memiliki fasilitas tempat buang air besar, jumlah ini turun sebesar 7,65 persen dibanding tahun 2013.

Tabel 7.3
Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar,
2013-2014

Fasilitas Tempat Buang Air Besar	Tahun	
	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Sendiri	36,94	40,29
Bersama	2,28	3,70
Umum	3,6	6,47
Tidak Ada	57,18	49,53

Sumber: Susenas 2013-2014

7.3 Sumber Penerangan dan Bahan Bakar Memasak

Fasilitas lain yang tak kalah penting adalah penerangan. Penerangan yang baik dan ideal untuk saat ini adalah listrik. Listrik dapat bersumber dari PLN maupun non-PLN. Sumber non PLN bisa diperoleh dengan generator dan PLTS. Selain penerangan, bahan bakar memasak dengan non-kayu lebih baik karena mengurangi dampak buruk terhadap penebangan hutan sehingga ketergantungan memasak dengan kayu dapat dikurangi, dengan demikian akan lebih baik bagi lingkungan alam, terutama kelestarian hutan dan keseimbangan fungsi hutan.

Tabel 7.4 menunjukkan perkembangan persentase rumah tangga yang mempunyai aliran listrik. Pada tahun 2013, rumah tangga yang dialiri arus listrik PLN mencapai 22,77 persen dan pada tahun 2014 menjadi

28,81 persen. Listrik non PLN pada tahun 2013 sebesar 18,26 persen dan pada tahun 2014 rumah tangga yang menggunakan Listrik non PLN naik sebesar 5,97 persen. Sedangkan untuk penerangan non listrik turun sebesar 12 persen dari tahun sebelumnya yaitu 58,96 persen tahun 2013 menjadi sebesar 46,98 persen. Perlu dicermati bahwa semakin bertambahnya penggunaan penerangan listrik baik PLN dan Non PLN. Hal ini sejalan dengan program Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai mengenai akses semua kecamatan terhadap Listrik melalui program Mentawai terang.

Tabel 7.4
Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan Utama (persen),
2013-2014

Jenis Penerangan	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Listrik PLN	22,77	28,81
Listrik non PLN	18,26	24,23
Non Listrik	58,96	46,96

Sumber: Susenas 2013-2014

Sementara menurut bahan bakar memasak, rumah tangga yang memakai bahan bakar non kayu adalah sebesar 18,28 persen terdiri dari 1,86 persen berjenis gas/elpiji dan 16,42 persen berjenis minyak tanah. Sebanyak 81,72 persen rumah tangga di Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2014 menggunakan bahan bakar jenis kayu untuk memasak. Jika tidak dilengkapi dengan sarana ventilasi/saluran pembuangan asap yang layak, keterpaparan akan asap dari aktivitas memasak akan berisiko terhadap kesehatan penghuni rumah. Selain

itu, penggunaan kayu bakar juga berdampak negatif terhadap kelestarian lingkungan.

Tabel 7.5
Rumah Tangga dengan Bakar Bakar Utama untuk Memasak (persen),
2013-2014

Jenis Bahan Bakar	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Gas/Elpiji	4,12	1,86
Minyak Tanah	12,76	16,42
Kayu	83,12	81,72

Sumber: Susenas 2013-2014

8

*Keterbandingan
Kabupaten dan
Kota*

<https://meta.waikab.bps.go.id>

BAB VIII

Keterbandingan Kabupaten dan Kota

Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. (*United Nation Development Programme–UNDP*). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya yang terbentuk dalam 3 (tiga) dimensi dasar yaitu angka harapan hidup keterwakilan dari hidup sehat dan panjang umur, melek huruf, pendidikan berupa rata-rata lama sekolah yang ditamatkan dan standar hidup layak yang dihitung dengan kemampuan daya beli masyarakat / *Purchasing Power Parity* (P3).

IPM dan Kemiskinan merupakan beberapa tolak ukur pembangunan yang dilakukan oleh kabupaten/kota. Metodologi yang sama antar kabupaten/kota untuk penghitungan indeks dan angka kemiskinan memungkinkan untuk dilakukan analisis perbandingan antar kabupaten kota, sehingga dapat digunakan untuk patokan kebijakan pembangunan pemerintahan daerah baik di kabupaten maupun kota. Berikut disajikan beberapa tabel keterbandingan IPM dan Angka Kemiskinan antar Kabupaten Kota se-Sumatera Barat tahun 2013-2014.

Seiring perjalanan waktu, Indeks yang ada dalam komponen IPM dianggap kurang menggambarkan yang sebenarnya, selain itu dengan menggunakan rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian rendah di satu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi di dimensi lain. Oleh karena itu dilakukanlah pembaharuan metodologi dalam penghitungan IPM 2014 dan IPM sebelumnya dilakukan backcasting dan adjustmen agar dapat dilakukan keterbandingan.

Tabel 8.1

Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Kabupaten/Kota, 2013-2014

KABUPATEN /KOTA	Angka Harapan Hidup	
	(tahun)	
	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Kepulauan Mentawai	63.53	63.55
Pesisir Selatan	69.43	69.46
Solok	66.90	66.95
Sijunjung	64.72	64.72
Tanah Datar	68.28	68.35
Padang Pariaman	67.18	67.24
Agam	70.78	70.80
Limapuluh Koto	69.19	69.22
Pasaman	65.73	65.76
Solok Selatan	66.02	66.04
Dharmas Raya	69.72	69.76
Pasaman Barat	66.90	66.93
Kota Padang	73.18	73.18
Kota Solok	72.33	72.34
Kota Sawah Lunto	69.14	69.17
Kota Padang Panjang	72.44	72.44
Kota Bukit Tinggi	73.12	73.12
Kota Payakumbuh	72.43	72.43
Kota Pariaman	69.48	69.49
Sumatera Barat	68.21	68.32

Sumber: Badan Pusat Statistik (IPM metode baru)

Tabel 8.2
Estimated Years Schooling (EYS) Menurut Kabupaten/Kota, 2013-2014

KABUPATEN /KOTA	Estimated Years Schooling	
	(persen)	
	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Kepulauan Mentawai	11.22	11.35
Pesisir Selatan	12.83	13.02
Solok	12.41	12.53
Sijunjung	11.61	11.91
Tanah Datar	12.61	12.82
Padang Pariaman	13.23	13.54
Agam	13.08	13.58
Limapuluh Koto	12.10	12.41
Pasaman	12.45	12.69
Solok Selatan	12.03	12.15
Dharmas Raya	11.79	12.19
Pasaman Barat	11.83	12.29
Kota Padang	14.65	15.20
Kota Solok	13.75	14.26
Kota Sawah Lunto	12.52	12.68
Kota Padang Panjang	14.56	14.73
Kota Bukit Tinggi	14.47	14.65
Kota Payakumbuh	14.13	14.18
Kota Pariaman	14.43	14.48
Sumatera Barat	13.16	13.48

Sumber: Badan Pusat Statistik (IPM metode baru)

Tabel 8.3
Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota, 2013-2014

KABUPATEN /KOTA	Rata-rata Lama Sekolah	
	(tahun)	
	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Kepulauan Mentawai	6.17	6.19
Pesisir Selatan	8.05	8.10
Solok	7.53	7.56
Sijunjung	7.30	7.32
Tanah Datar	7.78	7.80
Padang Pariaman	6.86	6.88
Agam	8.09	8.10
Limapuluh Koto	7.58	7.59
Pasaman	7.60	7.62
Solok Selatan	7.80	7.97
Dharmas Raya	7.94	7.99
Pasaman Barat	7.50	7.53
Kota Padang	10.89	10.93
Kota Solok	10.72	10.75
Kota Sawah Lunto	9.45	9.65
Kota Padang Panjang	10.53	10.79
Kota Bukit Tinggi	10.66	10.71
Kota Payakumbuh	9.93	9.96
Kota Pariaman	9.88	9.94
Sumatera Barat	8.28	8.29

Sumber: Badan Pusat Statistik (IPM metode baru)

Tabel 8.4
Pengeluaran per Kapita Menurut Kabupaten/Kota, 2013-2014

KABUPATEN /KOTA	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	
	(ribu rupiah PPP)	
	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Kepulauan Mentawai	5.451	5.566
Pesisir Selatan	8.233	8.368
Solok	9.118	9.228
Sijunjung	9.599	9.726
Tanah Datar	9.893	10.014
Padang Pariaman	9.937	9.990
Agam	8.637	8.692
Limapuluh Koto	8.568	8.672
Pasaman	6.964	7.058
Solok Selatan	9.291	9.390
Dharmas Raya	10.505	10.550
Pasaman Barat	7.809	7.897
Kota Padang	13.330	13.387
Kota Solok	10.784	10.927
Kota Sawah Lunto	8.665	8.780
Kota Padang Panjang	9.307	9.369
Kota Bukit Tinggi	12.002	12.137
Kota Payakumbuh	12.212	12.296
Kota Pariaman	11.508	11.541
Sumatera Barat	9.570	9.621

Sumber: Badan Pusat Statistik (IPM metode baru)

Tabel 8.5

**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota,
2013-2014**

KABUPATEN /KOTA	IPM		Peringkat IPM	
	2013	2014	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kepulauan Mentawai	56.33	56.73	19	19
Pesisir Selatan	67.31	67.75	11	11
Solok	66.15	66.44	14	14
Sijunjung	64.48	64.95	16	16
Tanah Datar	68.12	68.51	10	10
Padang Pariaman	67.15	67.56	12	12
Agam	68.73	69.32	8	8
Limapuluh Koto	66.30	66.78	13	13
Pasaman	62.91	63.33	18	18
Solok Selatan	65.86	66.29	15	15
Dharmas Raya	68.71	69.27	9	9
Pasaman Barat	63.92	64.56	17	17
Kota Padang	79.23	79.83	1	1
Kota Solok	75.54	76.20	4	4
Kota Sawah Lunto	69.07	69,61	7	7
Kota Padang Panjang	74.54	75.05	5	5
Kota Bukit Tinggi	77.67	78.02	2	2
Kota Payakumbuh	76.34	76.49	3	3
Kota Pariaman	74.51	74.66	6	6
Sumatera Barat	68.91	69.36	9	9

Sumber: Badan Pusat Statistik (IPM metode baru)

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



Badan Pusat Statistik
Kabupaten Kepulauan Mentawai
Jalan Raya Tuapeijat Km. 10, Sipora Utara
email: bps1301@bps.go.id
website: mentawai.kab.bps.go.id

